



LAPORAN KINERJA



2023

PREPARED BY

**BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,
ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka penyusunan Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana (SDMOT) Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Biro SDMOT sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, kepada *stakeholders*.

Laporan Kinerja Biro SDMOT Tahun 2023 ini berisikan informasi mengenai capaian kinerja dari Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro SDMOT Tahun 2023. Laporan disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, untuk kemudian diperoleh gambaran capaian kinerja Biro SDMOT dalam penyelenggaraan *good governance* di Sekretariat Kabinet.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro SDMOT terus melakukan berbagai upaya perbaikan kinerja agar dapat memberikan hasil yang lebih baik setiap tahunnya. Kedepan, Laporan ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pejabat/pegawai di lingkungan Biro SDMOT dan seluruh *stakeholders* dalam menganalisis permasalahan di bidang sumber daya manusia, organisasi, dan ketatalaksanaan. Sehingga dengan demikian, program dan kegiatan pada tahun mendatang dapat disusun dengan lebih tepat sasaran, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

Jakarta, Februari 2024

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana



Henny Navilah

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
1.3. Struktur Organisasi	3
1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	6
1.5. Sistematika Laporan	8
BAB II	
PERENCANAAN KINERJA	9
2.1. Rencana Strategis	9
2.2. Perencanaan Kinerja	11
BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Capaian Kinerja	14
3.2. Analisis Penggunaan Sumber Daya	35
BAB IV	
PENUTUP	37
LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1. PK Biro SDM OT Tahun 2023.....	12
Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja	15
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023.....	16
Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.....	17
Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	19
Tabel 3.5. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2..	20
Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3	29
Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3..	30
Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4	33
Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Biro SDM OT Tahun 2022	34

DAFTAR GRAFIK

	<i>Halaman</i>
Grafik 1.1. Struktur Organisasi Biro SDM OT Tahun 2023	5
Grafik 2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Biro SDM OT Tahun 2023.....	10
Grafik 3.1. Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Layanan Kepegawaian	22
Grafik 3.2. Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Program PKP	24
Grafik 3.3. Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Layanan Pembinaan Pegawai	26
Grafik 3.4. Perbandingan Nilai Sistem Merit Tahun 2020-2023	28
Grafik 3.5. Diagram Profil Pegawai di Lingkungan Biro SDM OT	35

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana (SDMOT) Tahun 2023 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja dari Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Biro SDMOT Tahun 2023. Permasalahan dan Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target sepanjang tahun 2023, akan menjadi dasar rencana tindak lanjut guna meningkatkan kinerja unit kerja pada tahun 2023.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Biro SDMOT Tahun 2023 adalah sebesar 83,03% (Memuaskan). Capaian tersebut merupakan rata-rata capaian dari total 3 (tiga) sasaran kegiatan Biro SDMOT, yang diukur melalui 8 (delapan) indikator kinerja dan 1 (satu) indikator tambahan yaitu Indeks Sistem Merit.

Berikut intisari capaian kinerja Biro SDMOT Tahun 2023:

Sasaran Program/Kegiatan		Capaian Kinerja
1	Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	125%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	105,71%
3	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	101,17%
TOTAL RATA-RATA		110,63%

Dalam proses pencapaian target, telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kinerja mulai dari melakukan penyempurnaan Indikator Kinerja, mengoptimalkan penggunaan sistem teknologi informasi dalam berbagai proses bisnis, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pegawai, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan kelembagaan ketatalaksanaan hingga pengelolaan dalam pemberian dukungan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama/Madya. Selain itu, Biro SDMOT juga

menyebarkan survei sebagai bentuk asesmen, guna mengukur kepuasan stakeholder terhadap pelayanan yang diberikan Biro SDMOT sepanjang tahun 2023.

Berdasarkan hasil asesmen tersebut, dapat disimpulkan seluruh kegiatan Biro SDMOT berhasil terlaksana dengan baik dan melebihi target. Hal itu dikarenakan, meningkatnya kinerja Biro SDMOT dan perubahan pengelolaan kinerja yang lebih adaptif. Namun, biro SDMOT tetap berkomitmen untuk mempertahankan nilai yang sudah baik dan meningkatkan hal-hal yang dapat diperbaiki kedepannya.

Secara umum target kinerja Biro SDMOT yang telah ditetapkan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Biro SDMOT berkomitmen untuk senantiasa melakukan upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja dan merespon tantangan zaman, diantaranya:

- 1) Optimalisasi teknologi dalam penyelenggaraan layanan kepegawaian;
- 2) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet secara berkelanjutan;
- 3) Penguatan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- 4) Meningkatkan kualitas pengelolaan pemberian dukungan pemikiran teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya kepada Tim Penilai Akhir.

Jakarta, Februari 2024

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana

Henny Navilah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara dimulai dari pejabat Eselon II ke atas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis. Pertanggungjawaban tersebut juga merupakan salah satu upaya perwujudan penyelenggaraan *Good Governance*.

Pertanggungjawaban dimaksud dituangkan dalam bentuk laporan yang disampaikan secara berjenjang kepada pimpinan Unit Organisasi/Menteri/Pimpinan Lembaga, untuk selanjutnya laporan kinerja akuntabilitas kinerja kementerian negara/lembaga yang telah disusun disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang pada akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana (SDMOT) Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Biro SDMOT sebagai entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja (Eselon II) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 dan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Biro SDMOT dalam tahun mendatang.

1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, maka kedudukan Biro SDMOT adalah sebagai berikut:

1.2.1. Kedudukan

Biro SDMOT adalah unit kerja yang dipimpin oleh Kepala Biro, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Deputi Bidang Administrasi.

1.2.2. Tugas

Biro SDMOT mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir, penyelenggaraan pembinaan dan perlindungan bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.

1.2.3. Fungsi

Biro SDMOT menyelenggarakan fungsi:

- a) perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- b) pengolahan data dan informasi kepegawaian;
- c) penyelenggaraan dan pengadministrasian pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan, kepangkatan, pemberhentian dan pensiun aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;

- d) pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugas untuk penyiapan pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
- e) penyiapan dan penyelesaian administrasi lainnya bagi aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- f) perencanaan, pelaksanaan, dan kerja sama dalam pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- g) pembinaan dan perlindungan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- h) pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Administrasi

1.3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dimaksud, Biro SDMOT membawahi 4 (empat) Bagian yaitu:

a) Bagian Kepegawaian

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengadaan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya, pengolahan data dan informasi kepegawaian, penelitian, penyiapan, dan penyelesaian administrasi pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pensiun aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta penyiapan dan pelaksanaan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Kepegawaian dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

- 1) Subbagian Perencanaan dan Informasi Pegawai;
- 2) Subbagian Mutasi, Kepangkatan, dan Pensiun; dan
- 3) Subbagian Pengelolaan Kesejahteraan Pegawai.

b) Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai

Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan kapasitas pegawai, dan kerja sama dalam rangka pengembangan kapasitas aparatur sipil negara dan pegawai lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Pengembangan Kapasitas Pegawai dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

- 1) Subbagian Perencanaan Pengembangan Kapasitas Pegawai;
- 2) Subbagian Pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Pegawai; dan
- 3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kapasitas Pegawai.

c) Bagian Penanganan Permasalahan Pegawai

Bagian Penanganan Permasalahan Pegawai mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penanganan permasalahan aparatur sipil negara dan pegawai lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, penyelenggaraan perlindungan hukum bagi aparatur sipil negara di lingkungan Sekretariat Kabinet, pelaksanaan konseling pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta penyelenggaraan administrasi pembinaan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Penanganan Permasalahan Pegawai dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian, yaitu:

- 1) Subbagian Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- 2) Subbagian Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Non Pegawai Negeri Sipil; dan
- 3) Subbagian Administrasi Pembinaan dan Konsultasi Pegawai.

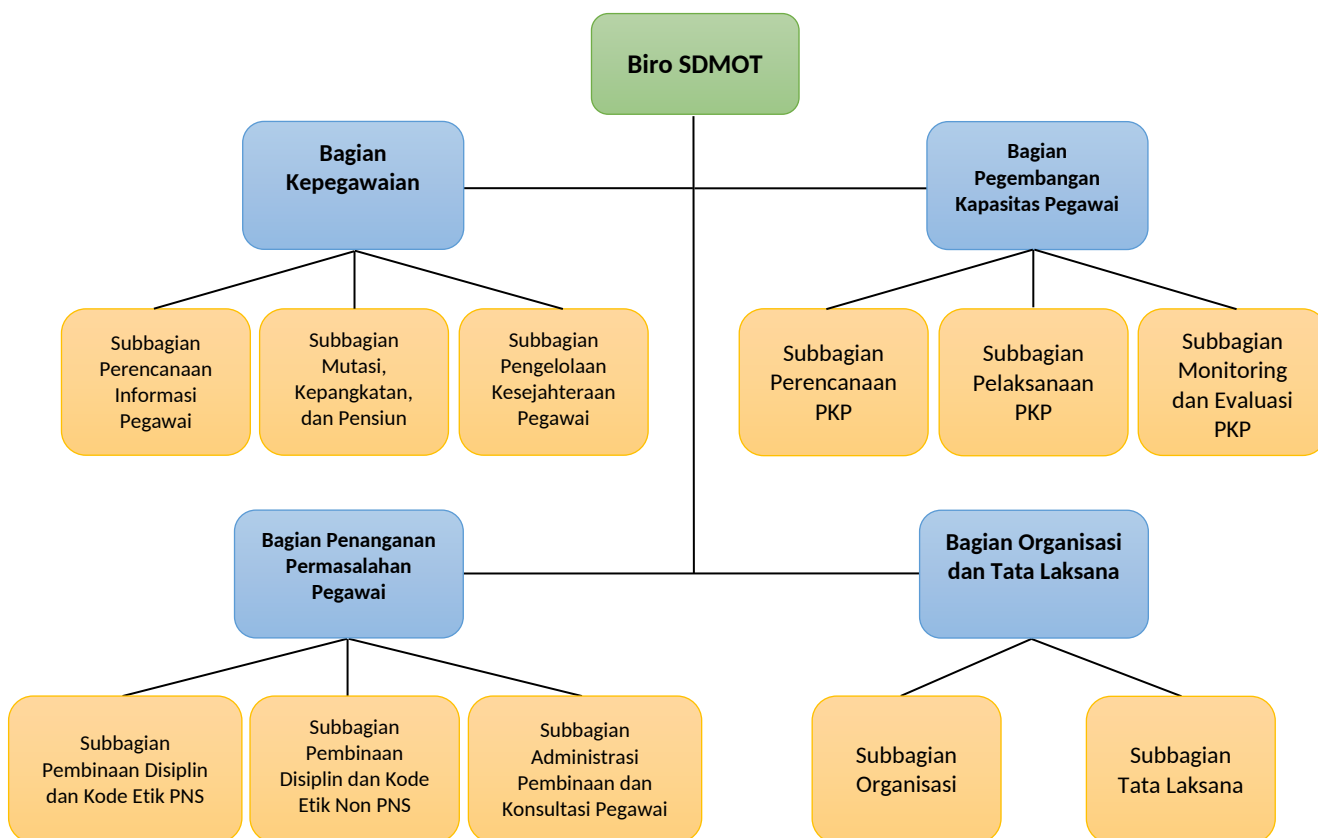
d) Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan organisasi dan ketatalaksanaan, serta pengelolaan peraturan internal di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Organisasi dan Tata Laksana dibantu oleh 2 (dua) Subbagian, yaitu:

- 1) Subbagian Organisasi;
- 2) Subbagian Tata Laksana.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, berikut gambaran struktur organisasi Biro SDMOT:



Grafik 1.1. Struktur Organisasi Biro SDMOT Tahun 2023

1.4. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Arah kebijakan Biro SDMOT dalam upaya mewujudkan visi, misi, tugas, dan fungsi Sekretariat Kabinet yaitu mengoptimalkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet. Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan tersebut, peran strategis Biro SDMOT adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas;
- b) Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang Berkualitas.

Dalam menentukan kekuatan maupun kelemahan serta permasalahan yang dihadapi sebuah organisasi, diperlukan analisis eksternal dan internal. Hasil analisis tersebut bersama dengan arahan strategis organisasi digunakan untuk menetapkan sasaran, perumusan strategis, dan implementasinya.

- a) Kekuatan
 - 1) Memiliki struktur organisasi serta tugas dan fungsi yang jelas;
 - 2) Tersedianya jumlah sumber daya manusia yang memadai; dan
 - 3) Komitmen pejabat dan pegawai dalam mengelola manajemen kepegawaian.
- b) Kelemahan
 - 1) Sistem Informasi Kepegawaian yang belum terintegrasi;
 - 2) Peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal; dan
 - 3) Sistem Informasi yang ada belum menunjang proses bisnis pelayanan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
- c) Peluang
 - 1) Tersedianya kesempatan mengikuti pendidikan yang ditawarkan oleh pihak/lembaga pemerintah yang lain untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia Sekretariat Kabinet;
 - 2) Perkembangan teknologi informasi pada era digital saat ini, termasuk di bidang sumber daya manusia; dan

- 3) Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak dan kementerian/lembaga lainnya.
- d) Ancaman
- 1) Sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan profesional pada instansi pemerintah lainnya;
 - 2) Adanya kinerja yang lebih akuntabel, transparan, dan dapat diukur pada instansi pemerintah lainnya dengan *core* yang sama.

Berdasarkan potensi, kelemahan, peluang, dan ancaman di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada selama ini maupun kemungkinan yang akan datang, meliputi:

a) Aspek Kelembagaan

Perubahan struktur organisasi yang cenderung dinamis berpotensi memperlambat proses adaptasi kerja.

b) Aspek Ketatalaksanaan

Koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal antara pejabat/pegawai di lingkungan Biro SDMOT serta dengan unit kerja lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Biro.

c) Aspek Sumber Daya Manusia

Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di Biro SDMOT perlu ditingkatkan guna menghadapi tuntutan dan beban kerja yang semakin besar. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan proyeksi Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai PermenPAN RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

d) Aspek Sarana dan Prasarana

Sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis teknologi informasi yang telah ada belum saling terintegrasi dan masih dalam proses pengembangan sehingga belum dapat dipergunakan secara optimal.

1.5. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian LKj Biro SDMOT Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan LKj tahun 2023, kedudukan Biro SDMOT dalam Sekretariat Kabinet beserta struktur organisasinya, serta aspek strategis dan permasalahan utama yang dihadapi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menjelaskan rencana strategis dan ikhtisar perjanjian kinerja Biro SDMOT.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan analisis atas capaian kinerja Biro SDMOT yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis organisasi, yang ditunjang dengan penyajian hasil pengukuran kinerja serta akuntabilitas keuangan.

BAB IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Biro SDMOT Tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Arah kebijakan Sekretariat Kabinet sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yaitu memberikan dukungan pengelolaan manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengacu pada arah kebijakan Sekretariat Kabinet tersebut, arah kebijakan Biro SDMOT adalah:

Mengoptimalkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana di Lingkungan Sekretariat Kabinet

Biro SDMOT sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi organisasi di bidang pengelolaan sumber daya manusia, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Oleh sebab itu, pada prinsipnya Biro SDMOT memiliki visi dan misi yang **selaras** dengan Sekretariat Kabinet. Adapun visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Biro SDMOT adalah sebagai berikut

VISI

Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan kelembagaan yang efektif di lingkungan Sekretariat Kabinet secara profesional

MISI

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Grafik 2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Biro SDMOT Tahun 2023

Penjelasan di atas pada prinsipnya menggambarkan arah organisasi secara berjenjang. Dimulai dari menetapkan visi, untuk selanjutnya visi tersebut dituangkan menjadi misi, menetapkan tujuan, dan menetapkan sasaran kegiatan yang lebih spesifik dan terfokus. Setelah menetapkan sasaran kegiatan, langkah selanjutnya adalah menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja diperlukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan secara terukur dan dapat dicapai.

Keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sangat penting karena dapat menjadi pertimbangan dalam:

- a) Meningkatkan probabilitas keberhasilan pencapaian rencana jangka panjang unit kerja, karena keberhasilan unit kerja berkontribusi dalam keberhasilan tujuan organisasi;
- b) Meletakkan dasar yang kuat untuk melaksanakan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi; dan
- c) Memicu kesadaran dan tanggung jawab seluruh unsur penyelenggara organisasi untuk memberikan performa yang baik dalam rangka pemenuhan capaian kinerja organisasi.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki instansi/satuan organisasi/unit kerja dalam rentang kurun waktu satu tahun. Perjanjian tersebut merepresentasikan komitmen dan janji yang jelas dan terukur, sehingga akan mendorong pengemban tanggung jawab untuk senantiasa meningkatkan kinerja satuan yang dipimpinnya. PK juga berfungsi sebagai medium penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan, serta sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

Sasaran kegiatan merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Pencapaian sasaran dapat mengarahkan pada kegiatan yang spesifik dan terfokus, sehingga memudahkan pengalokasian sumber-sumber daya

yang diperlukan. Guna mencapai sasaran kegiatan dimaksud, diperlukan indikator kinerja yang terukur dan dapat dicapai.

Biro SDMOT telah menyusun PK sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan kinerja yang diperjanjikan kepada pimpinan dan *stakeholders* pada tahun 2023. PK Biro SDMOT dimaksud terdiri dari sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	90%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	80%
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	85%
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	85%
		Indeks Sistem Merit	300 (Sangat Baik)
3	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Nilai Evaluasi Kelembagaan	80%
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%
		Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu	80%
		Persentase kepuasan terhadap bantuan layanan hukum	75%
4	Terwujudnya Pengelolaan	Indeks Revisi Program dan	C (9-12)

	Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana yang efektif	Anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	kali revisi)
		Presentase penyerapan anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	90%

Tabel 2.1 | PK Biro SDMOT Tahun 2023

Pada prinsipnya, PK dapat dilihat sebagai instrumen yang digunakan sebagai pedoman bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya. Adanya PK juga dapat membangun motivasi bekerja dengan orientasi *outcome*, mengingat hal ini diperlukan guna mencapai sasaran kegiatan dan tujuan di unit kerja dan level Eselon masing-masing. Keberhasilan tersebut akan turut berdampak pada keberhasilan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan. Penjabaran lebih lanjut mengenai capaian kinerja Biro SDMOT atas sasaran kegiatan yang telah ditetapkan akan dijelaskan pada BAB selanjutnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Biro SDMOT merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran di bidang pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan ketatalaksanaan. Kinerja Biro SDMOT dibangun melalui komitmen terhadap pemenuhan target kinerja yang diperjanjikan di awal tahun serta upaya menindaklanjuti rekomendasi baik dari hasil evaluasi pihak internal maupun eksternal. Upaya pemenuhan target kinerja dimaksud serta tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja akan menelurkan suatu hasil yang disebut dengan capaian kinerja

Gambaran mengenai capaian kinerja diperoleh melalui pengukuran yang sistematis dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektivitas unit kerja dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas yang diamanatkan kepada unit kerja tersebut. Pengukuran digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan indikator kinerja berdasarkan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat keberhasilan pada indikator kinerja menggambarkan kualitas ketercapaian tujuan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Biro SDMOT dengan realisasinya. Pengukuran capaian kinerja Biro SDMOT Tahun 2023 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja	Penggolongan Kategori Capaian
1.	>100%	Memuaskan	Biru
2.	85% - 100%	Sangat Baik	Hijau
3.	70% - 85%	Baik	Oranye
4.	55% - 70%	Cukup	Kuning
5.	<55 %	Kurang Baik	Merah

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

Berikut adalah capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan di dalam PK:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	90%	100%	111,11%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	80%	82,14%	102,67%
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program	85%	80,21%	94,36%

		pengembangan kapasitas pegawai			
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	85%	80,74%	94,98%
		Indeks Sistem Merit	300	329	109,66%
3	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Nilai Evaluasi Kelembagaan	80%	72,92%	91,15%
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%	92,17%	115,21%
		Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu	80%	100%	125%
		Persentase kepuasan terhadap bantuan layanan hukum	75%	79,70%	106,26%
4	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	C (9-12 kali revisi)	8	B
		Presentase penyerapan anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	90%	99,10%	110,11%

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, berdasarkan perbandingan antara tingkat realisasi dengan target, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar capaian pada beberapa indikator kinerja telah tercapai secara optimal (melebihi target),

namun masih terdapat capaian pada indikator kinerja yang belum mencapai target minimum yang ditetapkan.

Uraian rinci mengenai capaian kinerja Biro SDMOT Tahun 2023, dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yang ditetapkan pada tanggal 6 April 2020, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir. Fungsi tersebut diejawantahkan ke dalam sasaran kegiatan berupa *“terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas”*.

Sasaran kegiatan dimaksud mempunyai indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Pencapaian Kinerja
Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	90%	100%	111,11%	Memuaskan

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Penghitungan capaian indikator kinerja tersebut dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu}}{\text{Jumlah Rancangan Keppres terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$$

Pada tahun 2023, terdapat 187 (seratus delapan puluh tujuh) Keppres yang diselesaikan tepat waktu dan seluruhnya disampaikan kepada Presiden. Dengan kata lain, realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 100%. Hasil penghitungan menggambarkan pencapaian kinerja berupa Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu tergolong kategori Memuaskan.

3.1.2. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia

Sasaran tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet, antara lain meliputi kegiatan:

- a) Penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai lainnya;
- b) Penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai;
- c) Penatausahaan pensiunan dan kenaikan pangkat;
- d) Penyelesaian administrasi penggajian dan kesejahteraan;
- e) Pelayanan absensi, cuti, surat keterangan, dan Sistem Informasi Pegawai;

- f) Pelayanan tanda pengenal pegawai, asuransi kesehatan, dan administrasi lainnya;
- g) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- h) Pemberian beasiswa;
- i) Pelaksanaan magang;
- j) Pembinaan ASN dan pegawai lain di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- k) Penyelesaian permasalahan pegawai;
- l) Penegakan kode etik dan disiplin pegawai; dan
- m) Penyelesaian Administrasi terkait Permohonan Izin ke Luar Negeri;

Uraian mengenai capaian atas sasaran dimaksud sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Pencapaian Kinerja
1	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	80%	82,14%	102,67%	Memuaskan
2	Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	85%	80,21%	94,36%	Sangat Baik
3	Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	85%	80,74%	94,98%	Sangat Baik
4	Indeks Sistem Merit	300	329	109,66%	Memuaskan

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

Penghitungan capaian indikator kinerja tersebut dilakukan melalui survei, dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner secara *online* yang diselenggarakan oleh Biro SDMOT pada tanggal 10 s.d. 16 Januari 2024. Responden survei adalah perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet yang terdiri dari 4 (empat) level pejabat struktural meliputi Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan 1 (satu) orang pelaksana. Pada realisasinya, terdapat 117 (seratus tujuh belas) responden yang mengisi survei tersebut. Adapun hasil survei

menunjukkan pencapaian kinerja terhadap peningkatan kualitas layanan manajemen SDM tergolong kategori Memuaskan.

Berikut merupakan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya:

Tahun	Target	Realisasi		Capaian		Kategori Pencapaian Kinerja
		PK 1	PK 2	PK 1	PK 2	
Persentase kepuasan layanan kepegawaian						
2020	70%	79,25%		113,21%		Memuaskan
2021	70%	81,05%		115,78%		Memuaskan
2022	75%	83,04%		110,72%		Memuaskan
2023	80%	82,14%		102,67%		Memuaskan
Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai						
2020	80%	75,17%	74,05%	93,96%	92,56%	Sangat Baik
2021	80%	73,30%		91,63%		Sangat Baik
2022	80%	80,00%		100,00%		Sangat Baik
2023	85%	80,21%		94,36%		Sangat Baik
Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai						
2020	80%	78,10%	77,25%	97,62%	96,56%	Sangat Baik
2021	80%	77,54%		96,93%		Sangat Baik
2022	80%	81,07%		101,34%		Memuaskan
2023	85%	80,74%		94,98%		Sangat Baik

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

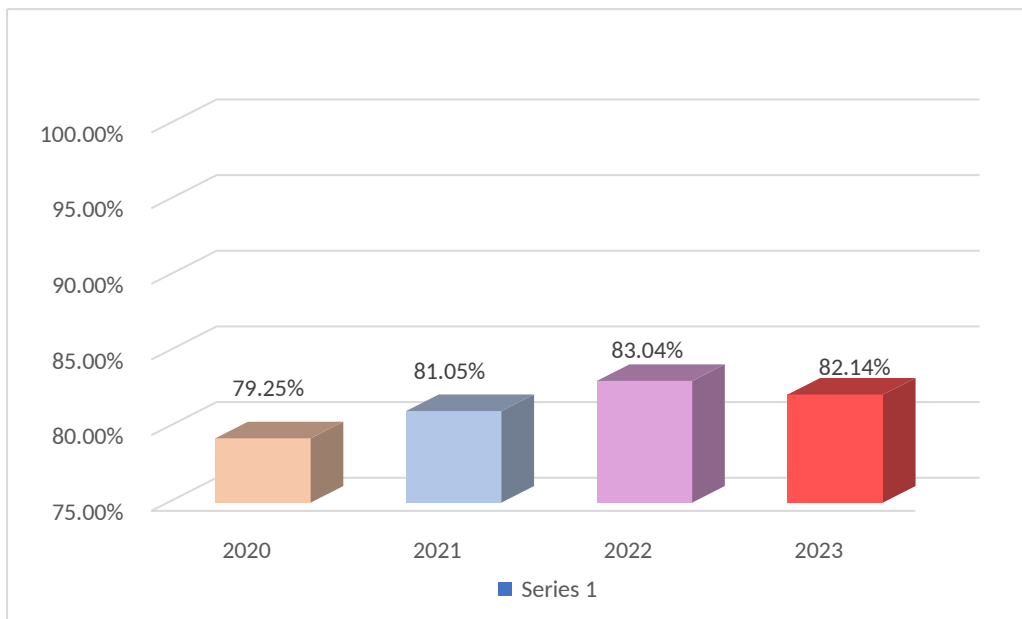
1) Persentase kepuasan layanan kepegawaian

Berikut daftar pertanyaan pada survei mengukur kepuasan Layanan Kepegawaian diantaranya:

1. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepegawaian (SIASN, SIMPEG, dan MySAPK);

2. Penyelesaian Administrasi Kartu Pegawai, Kartu Istri/Suami, Laporan Perkawinan, Laporan Penambahan Anak, dan Laporan Kematian;
3. Pengelolaan Administrasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Kabinet;
4. Penyelesaian Administrasi terkait Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai, serta Pelaksanaan Pelantikan;
5. Pengelolaan Administrasi Pensiun, Kenaikan Pangkat, dan Pencantuman Gelar Akademik;
6. Penyelesaian Hak Keuangan (Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Khusus Dukungan Tugas Kepresidenan, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Uang Makan, Uang Lembur, dan Uang Makan Lembur);
7. Pengurusan Data Kehadiran Pegawai, Cuti, dan Surat Keterangan; dan
8. Pengurusan Administrasi Kartu Tanda Pengenal, Jaminan Kesehatan, dan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, indeks kepuasan *stakeholder* terhadap layanan kepegawaian cenderung mengalami fluktuasi, namun tidak ekstrim. Pada tahun 2020 angka indeks kepuasan sebesar 79,25%, kemudian pada tahun 2021 lalu indeks kepuasan kembali mengalami peningkatan, naik menjadi sebesar 81,05%, dilanjutkan dengan peningkatan pada tahun 2022 sebesar 83,04% dan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 82,14%. Berdasarkan hasil tersebut telah mencapai target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja (sebesar 80%). Gambaran mengenai perbandingan indeks kepuasan layanan kepegawaian dapat dilihat pada grafik berikut:



rvei Kepuasan Layanan Kepegawaian

Hasil yang sudah baik tersebut tetap akan dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kinerja Biro SDMOT semakin baik dan dapat bermanfaat secara riil bagi para pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet. Dalam meningkatkan kinerja Biro SDMOT, beberapa langkah yang perlu dilakukan diantaranya:

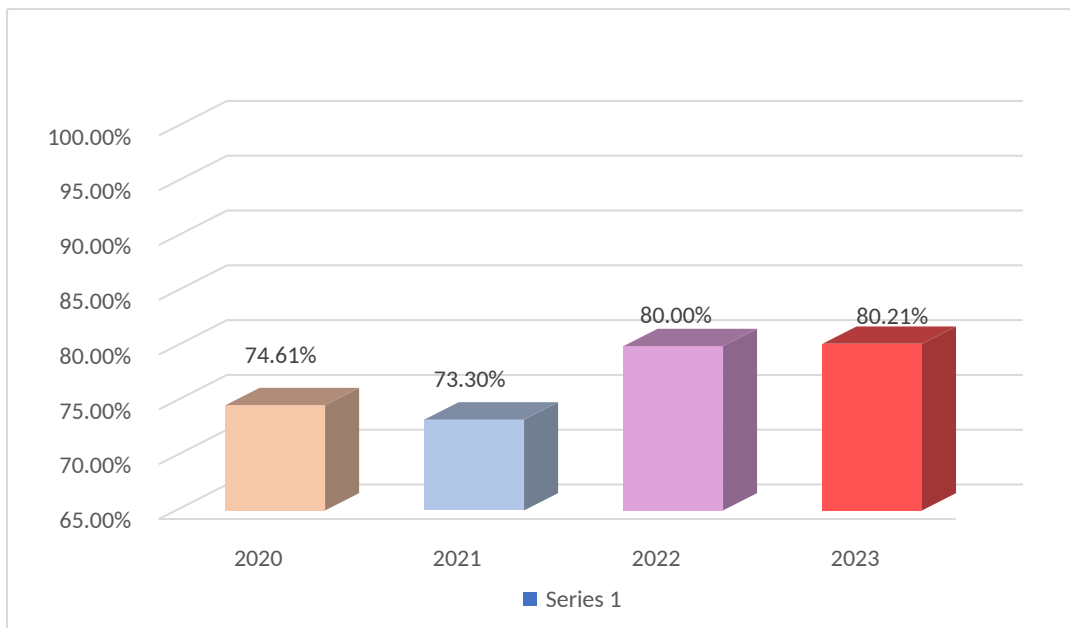
1. Penguatan koordinasi seluruh pegawai di lingkungan Biro SDMOT dalam pembaruan data-data dan informasi terkait kepegawaian;
2. Optimalisasi sistem teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet;
3. Pengintegrasian data kepegawaian;
4. Peningkatan kualitas dan pembaruan layanan Biro SDMOT; dan
5. Penguatan monitoring dan evaluasi layanan kepegawaian oleh Biro SDMOT antara lain melalui penambahan Standar Operasional Prosedur (SOP).

2) **Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai**

Berikut daftar pertanyaan pada survei mengukur kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai diantaranya:

1. Penyelenggaraan Program Pengembangan Kapasitas Pegawai (Diklat, Seminar, Workshop, Webinar, dan lain-lain).
2. Program Pengembangan Kompetensi Pegawai sesuai kebutuhan (berdasarkan kalender diklat yang disusun sesuai usulan dari setiap Unit Kerja dan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran);
3. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Program Pengembangan Kompetensi Pegawai (kuesioner pasca pelaksanaan) dengan laporan yang telah disampaikan ke setiap Unit Kerja;
4. Pelayanan Administrasi Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Pemberian Beasiswa; dan
5. Pengelolaan Peserta Magang.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai terjadi fluktuasi, dan masih dalam kategori Sangat Baik. Pada tahun 2020 angka indeks kepuasan berdasarkan PK 1 sebesar 75,17% dan berdasarkan PK 2 sebesar 74,05%, lalu pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yakni sebesar 73.30%, namun pada tahun 2022, angka indeks kepuasan mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu sebesar 80%. Pada tahun 2023, angka indeks kepuasan mengalami kenaikan sebesar 80,21% dengan kategori prestasi Sangat Baik. Walaupun mengalami kenaikan, tetapi berdasarkan hasil tersebut belum mencapai target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja yaitu 85%. Gambaran mengenai perbandingan indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.2 Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Terhadap Pelaksanaan Program PKP

Berdasarkan grafik tersebut, indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 1.01% karena masih terfokusnya pada Pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada anggaran. Namun, terlihat kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 6.7%, dan di tahun 2023 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,21 % (walaupun belum memenuhi target 85%), tetapi semua itu berkaitan dengan telah mulai dibuka kesempatan pengembangan secara tatap muka, dan inovasi baru seperti penyelenggaraan Bestie (Bulan E-Seminar Topik dan Isu Terkini) dan pengembangan mandiri yang menambah *experience* baru terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi.

Berdasarkan nilai rata-rata kepuasan terhadap pelaksanaan program PKP yang belum mencapai target 85%, Biro SDMOT masih terus meningkatkan kualitas program pengembangan kapasitas pegawai agar bisa mendapatkan kategori Memuaskan, baik dari sisi substansi program maupun teknis penyelenggaraan. Upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menyelenggarakan program PKP sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi masing-masing pegawai (tepat sasaran),

- sehingga setiap pegawai yang mengikuti program tersebut dapat merasakan manfaatnya untuk peningkatan kinerja;
2. Merencanakan dan melaksanakan program PKP dengan topik-topik yang sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan media pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi;
 3. Merencanakan dan melaksanakan program PKP non klasikal bentuk lain untuk menjangkau lebih banyak peserta program;
 4. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat khususnya terkait pemanfaatan Diklat secara berkala;
 5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan agar lebih efektif dan efisien;
 6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program PKP;
 7. Menyediakan informasi atau kesempatan beasiswa yang lebih luas kepada pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
 8. Menindaklanjuti proses permohonan izin belajar secara cepat dan akurat.

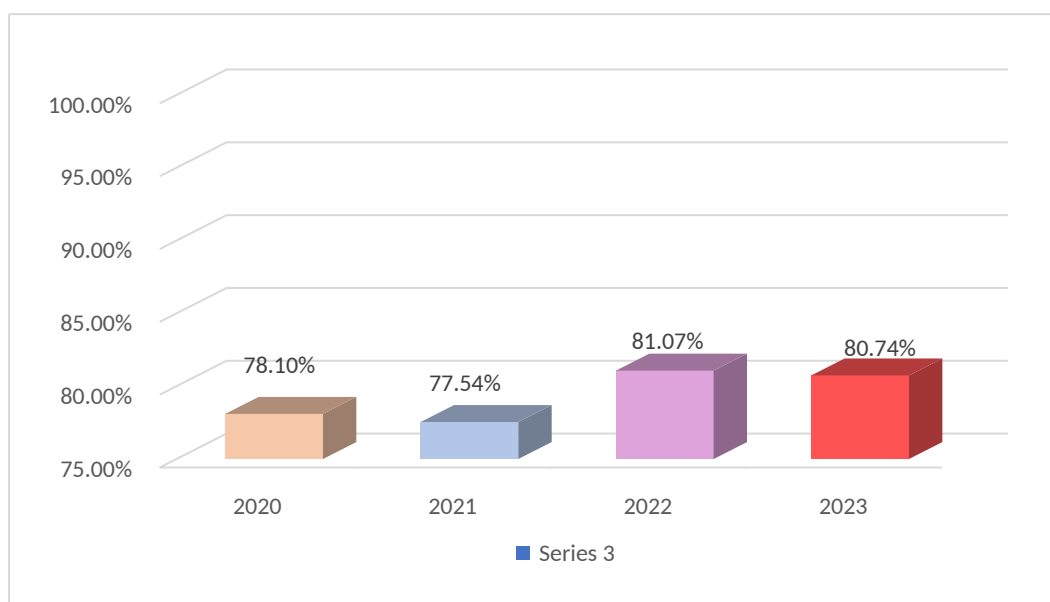
3) Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai

Berikut daftar pertanyaan pada survey mengukur layanan pembinaan pegawai diantaranya:

1. Pembinaan Disiplin dan Kode Etik PNS;
2. Penanganan Permasalahan PNS;
3. Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Non PNS (termasuk PTT);
4. Penanganan Permasalahan Non PNS (termasuk PTT);
5. Pelaksanaan Layanan Konseling Pegawai;
6. Pelayanan Administrasi Penghargaan Tanda Jasa/Kehormatan; dan
7. Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, indeks kepuasan layanan pembinaan pegawai cenderung stabil. Pada tahun 2020 indeks kepuasan berdasarkan PK 1 sebesar 78,10% dan pada tahun 2021 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 77,54%. Selanjutnya, pada tahun 2022

kembali mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 81,01%. Dan terjadi penurunan kembali di tahun 2023 yaitu sebesar 80,74% sehingga belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 85%. Gambaran mengenai perbandingan indeks kepuasan peserta terhadap layanan pembinaan pegawai dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.3 Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Layanan Pembinaan Pegawai

Berdasarkan grafik tersebut, indeks kepuasan layanan pembinaan pegawai pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,33% dari tahun 2022. Dalam hal ini, Biro SDMOT terus mendukung inovasi yang telah dilakukan, yaitu Layanan Konseling dengan bantuan Psikolog Ahli dan Setkab Siap sebagai pelayanan satu pintu.

Selain itu, guna tetap terus mempertahankan dan meningkatkan performa layanan pembinaan pegawai, Biro SDMOT telah melakukan upaya-upaya diantaranya:

1. Melakukan upaya penanganan permasalahan pegawai secara terintegrasi, dari sisi preventif (berorientasi pemberdayaan serta pengembangan) dan dari sisi kuratif (pemberian keputusan yang tepat bagi penyelesaian masalah pegawai);
2. Menyelenggarakan kegiatan yang mengangkat isu-isu terkait permasalahan di lingkungan kerja;

3. Memanfaatkan teknologi informasi untuk lebih memudahkan komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh Pegawai;
4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka menyelesaikan administrasi izin pegawai ke luar negeri; dan
5. Optimalisasi *database* pengusulan dan pemberian tanda kehormatan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.

4) Indeks Sistem Merit

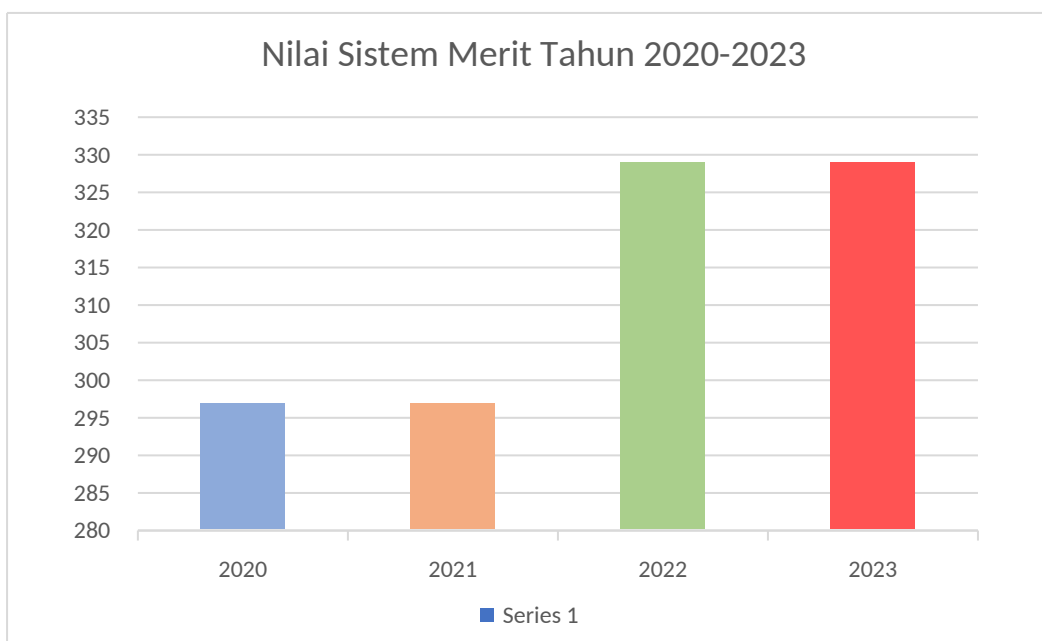
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan manajemen ASN. Di dalam undang-undang tersebut, dapat digambarkan bahwa tujuan besarnya adalah melahirkan ASN yang kompeten, handal, dan kompetitif. Hal tersebut dapat diwujudkan pada penerapan Sistem Merit. Selanjutnya, sebagai upaya mewujudkan penerapan Sistem Merit di lingkungan pemerintahan, maka diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Langkah selanjutnya adalah penerapan. Maka dari itu, sejak tahun 2019 didasari dengan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Sistem Merit diterapkan di setiap instansi pemerintahan dan dinilai setiap tahunnya oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), termasuk Sekretariat Kabinet.

Sistem Merit tentunya berjalan di bawah Kedeputian Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet pada Unit Kerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana. Pada tahun pertama penilaian Sistem Merit, tahun 2020, Sekretariat Kabinet berada pada kategori III (baik). Sesuai dengan peraturan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 diatas, terdapat 8 Aspek penilaian yaitu:

1. Perencanaan Kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan Karir;
4. Promosi dan Mutasi;
5. Manajemen Kinerja;
6. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin;
7. Perlindungan dan Pelayanan;
8. Sistem Informasi.

Secara keseluruhan sejak tahun pertama penilaian Sistem Merit ini berjalan, Deputi Bidang Administrasi selalu meningkatkan layanannya yang membuahkan hasil dengan meningkatkan penilaian tersebut pada tahun 2022. Pada tahun 2020-2021, Sekretariat Kabinet sudah berada dalam kategori III (Baik) namun peningkatan yang dilakukan membuahkan instansi ini berada dalam kategori IV (Sangat Baik) sesuai dengan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 55/KEP.KASN/C/XI/2022. Keputusan Penerapan Sistem Merit ini berlaku selama 2 (dua) tahun. Hal tersebut dapat dilihat melalui gambar di bawah



Grafik 3.4 Perbandingan Nilai Sistem Merit Tahun 2020-2023

3.1.3 Sasaran: Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana

Sasaran ini diwujudkan dalam bentuk penyusunan peraturan Internal (Peraturan dan Keputusan Sekretaris Kabinet serta Peraturan dan Keputusan Deputi Bidang Administrasi di bidang organisasi dan tata laksana), penyusunan kajian terkait organisasi dan tata laksana serta pemberian bantuan layanan hukum. Uraian mengenai capaian atas sasaran dimaksud sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Pencapaian Kinerja
1	Nilai Evaluasi Kelembagaan	80%	72,92%	91,15%	Sangat Baik
2	Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%	92,17%	115,21%	Memuaskan
3	Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu	80%	100%	125%	Memuaskan
4	Persentase kepuasan terhadap bantuan layanan hukum	75%	79,70%	106,26%	Memuaskan

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

Penghitungan capaian indikator kinerja tersebut dilakukan melalui beberapa jenis survei, dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner. Responden survei merupakan perwakilan pejabat/pegawai dari masing-masing unit kerja serta eselon di lingkungan Sekretariat Kabinet. Berdasarkan hasil survei menunjukkan pencapaian kinerja semuanya tergolong kategori Memuaskan. Berikut merupakan perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2023 dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya:

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Pencapaian Kinerja
Nilai Evaluasi Kelembagaan				
2020	80%	61,44%	76,80%	Baik
2021	80%	72,92%	91,15%	Sangat Baik
2022	80%	72,92%	91,15%	Sangat Baik
2023	80%	72,92%	91,15%	Sangat Baik
Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana				
2020	80%	86,67%	108,33%	Memuaskan
2021	80%	90%	112,5%	Memuaskan
2022	80%	77,57%	96,96%	Sangat Baik
2023	80%	92,17%	115,21%	Memuaskan
Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu				
2021	80%	74.58%	93.2%	Sangat Baik
2022	80%	80,61%	100,76%	Memuaskan
2023	80%	100%	125%	Memuaskan
Nilai kepuasan terhadap bantuan layanan hukum				
2021	70%	76.50%	109.28%	Memuaskan
2023	70%	81,07%	115,81%	Memuaskan
2023	75%	79,70%	106,26%	Memuaskan

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

1) Persentase penilaian atas efektivitas kelembagaan

Capaian indikator kinerja efektivitas kelembagaan tahun 2023 diperoleh dari hasil Laporan Evaluasi Kelembagaan Tahun 2021. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, dimana aspek-aspek yang dievaluasi

meliputi indikator-indikator yang terkandung di dalam masing-masing dimensi dan subdimensi.

Penghitungan capaian indikator kinerja tersebut dilakukan melalui survei, dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner secara *online*, dimana responden survei ini adalah Pimpinan Unit Kerja (Eselon II) dan 1 (satu) orang perwakilan Pejabat Eselon III di masing-masing unit kerja dengan total sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang.

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 72.92% dimana angka ini terjadi kenaikan yang sangat signifikan dari beberapa tahun sebelumnya, namun hasil yang diperoleh tersebut belum mencapai target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja (sebesar 80%). Dari angka selisih tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Selain itu, subdimensi dengan nilai tertinggi adalah Teknologi Informasi sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi senantiasa beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga setiap penyelenggaraan tugas dan fungsi telah ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai. Oleh sebab itu, Biro SDMOT seyogyanya tetap perlu terus meningkatkan kinerja organisasi kedepannya dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Meningkatkan koordinasi, kontrol dan komunikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi;
2. Peraturan, prosedur, instruksi dan komunikasi yang telah dibakukan perlu disosialisasikan secara optimal;
3. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet perlu berjalan beriringan dengan penguatan budaya kerja dengan metode *paperless*.

2) Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana

Berdasarkan dari hasil evaluasi SOP didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi SOP di lingkungan Sekretariat Kabinet mendapatkan hasil di atas rata-rata minimal standar manajemen tata laksana, yaitu

mencapai 92,17% dari total 99 responden di setiap unit kerja yang ada di lingkungan Sekretariat Kabinet.

2. Evaluasi SOP secara umum menunjukkan hasil baik di atas standar minimal sebesar 80%, yaitu mencapai angka persentase 90,17%. Namun sisanya memberi tanggapan bahwa SOP yang sudah ada perlu dilakukan evaluasi kembali dan diselaraskan dengan SOTK Perseskab terbaru sesuai dengan tugas dan fungsi untuk meningkatkan efektifitas kinerja dari masing-masing pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang didapat dalam proses evaluasi SOP di lingkungan Sekretariat Kabinet, ada beberapa saran yang bisa dipertimbangkan untuk diterapkan dalam upaya pencapaian kinerja yang optimal melalui SOP, yakni:

1. Perlu penyempurnaan terhadap beberapa SOP yang telah ada di lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai dengan SOTK terbaru guna meningkatkan kinerja baik kinerja individu maupun kinerja organisasi.
2. Peningkatan sisi pemenuhan SOP di lingkup unit kerja Sekretariat Kabinet, yang ditunjang dengan kualitas substansi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip SOP, sehingga dapat diterapkan secara optimal di organisasi.
3. Perlu diadakan sosialisasi dan evaluasi berkala pada tiap unit kerja untuk memastikan dan menyelaraskan pendapat antara unit kerja dengan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana.

3) Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu

Penghitungan capaian indikator kinerja produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan-peraturan internal yang telah diselesaikan. Pada tahun 2023, terdapat 72 (tujuh puluh dua) Peraturan Internal yang diselesaikan tepat waktu. Dengan kata lain, realisasi indikator kinerja tersebut sebesar 100% (melebihi dari target 80%). Hasil penghitungan menggambarkan pencapaian kinerja berupa Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu tergolong kategori Memuaskan.

Selanjutnya, Biro SDMOT tetap perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja penyelesaian produk hukum sesuai skala prioritas sehingga dapat terselesaikan secara tepat waktu.

4) Persentase kepuasan terhadap bantuan layanan hukum

Penghitungan capaian indikator kinerja kepuasan terhadap bantuan layanan hukum merupakan pertama kali dilakukan melalui survei, dengan menggunakan alat ukur berupa kuesioner secara *online* dan target responden yang sama dengan mengukur capaian indikator kinerja produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu. Hanya terdapat 1 (satu) pertanyaan pada survey mengukur kinerja kepuasan terhadap bantuan layanan hukum yaitu Pelaksanaan Pendampingan Hukum.

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh nilai rata-rata sebesar 79,70%, dimana angka ini telah mencapai target yang ditetapkan di Perjanjian Kinerja (sebesar 75%). Oleh sebab itu, Biro SDMOT seyogyanya tetap perlu terus responsif dalam meningkatkan pelayanan terhadap pendampingan bantuan layanan hukum guna meningkatkan kepuasan untuk tahun berikutnya.

3.1.4 Sasaran: Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana yang efektif

Sasaran ini merupakan sasaran baru di tahun 2023 yang sebelumnya tidak menjadi sasaran kinerja. Uraian mengenai sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori Pencapaian Kinerja
1	Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	C (9-12 kali revisi)	8 kali revisi	B	Memuaskan
2	Presentase penyerapan anggaran	90%	99,10%	110,11%	Memuaskan

T
a
b
e
l
3.
8

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

Biro SDMOT menjalankan program Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Sekretariat Kabinet. Program tersebut terdiri dari Layanan Manajemen SDM, Layanan Manajemen Organisasi, dan Tata Laksana. Pagu awal yang diperjanjikan dalam PK Biro SDMOT adalah Rp. 207.251.316.000 Anggaran tersebut menopang kegiatan Biro SDMOT tahun 2023 yang termuat di dalam sasaran kegiatan. Berikut ini tabel alokasi beserta realisasi anggaran per sasaran kegiatan tahun 2023:

Pagu Awal*	Pagu Revisi*	Realisasi*	% Realisasi	% Capaian Kinerja*
Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas				
1.851.201.000	1.638.784.000	1.599.748.015	97.62%	108.46%
Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia				
204.696.370.000	227.706.823.000	225.648.478.814	99.19%	119.03%
Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana				
703.745.000	213.931.000	213.009.896	66,52%	84.46%
TOTAL				
207.251.316.000	229.559.538.000	227.461.236.725	99,10%	110,11%

* dalam rupiah

* rata-rata capaian indikator kinerja masing-masing sasaran

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Biro SDMOT Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah anggaran Biro SDMOT setelah revisi pengalihan anggaran menjadi Rp. 229.599.538.000. Sedangkan realisasi/penyerapan anggaran sebesar Rp. 227.461.236.725 atau sama dengan 99,10%, dengan penyerapan pada masing-masing sasaran kegiatan seperti yang dapat dilihat lebih lanjut di dalam tabel. Hasil ini menggambarkan bahwa penyerapan anggaran di Biro SDMOT tersebut sangat baik.

Pengukuran sejauh mana penggunaan anggaran berjalan dengan efektif dan efisien dapat dilihat dari pencapaian target. Sebuah kegiatan dapat disebut efektif apabila kegiatan yang dilaksanakan mampu membuat tercapainya tujuan dan sasaran kegiatan. Dengan kata lain, efektivitas menitikberatkan pada hasil. Sedangkan efisien adalah kondisi dimana sebuah kegiatan mampu menghasilkan *output* yang optimal dengan *input* minimum. Dengan kata lain, efisiensi menitikberatkan pada proses.

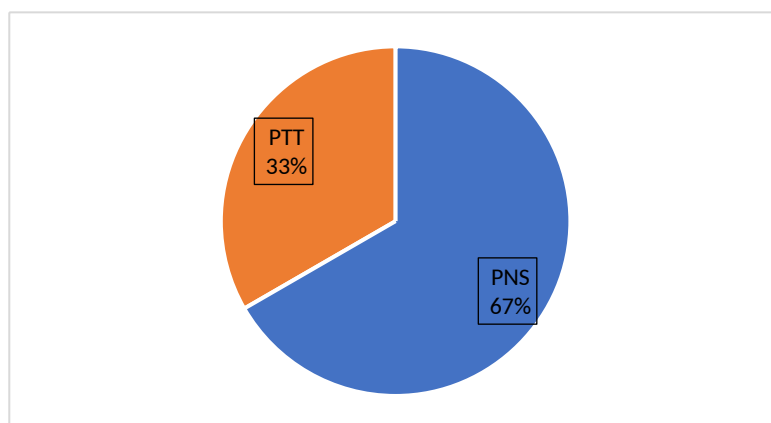
Untuk dapat disimpulkan, penilaian untuk seluruh sasaran kegiatan berdasarkan kategori capaian kinerja memperoleh hasil **Memuaskan** dengan nilai persentase rata-rata kepuasan kinerja Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana sebesar **102.12%**

3.2 Analisa Penggunaan Sumber Daya

Analisa ini memberikan gambaran mengenai kondisi sumber daya manusia, dan sarana prasarana di lingkungan Biro SDMOT Tahun 2023. Penjelasan juga menggambarkan bagaimana penggunaan seluruh sumber daya dimaksud dalam mendukung kinerja Biro SDMOT guna mencapai target-target yang telah ditetapkan.

3.2.2. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Desember 2023, Biro SDMOT didukung oleh sebanyak 45 orang, diantaranya 30 orang PNS dan 12 orang PTT.



Grafik 3.5 Diagram Profil Pegawai di Lingkungan Biro SDMOT

Pada tahun 2023, proses pengalihan Jabatan Administrator ke dalam Jabatan Fungsional sebagai bagian dari program prioritas (*Quick Wins*) Sekretariat Kabinet telah dimulai dan prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Biro SDMOT nantinya akan didukung oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pengalihan tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

3.2.3. Sarana Prasarana

Sarana Alat Pengolah Data (APD) yang dimiliki Biro SDMOT sepanjang tahun 2023 sudah cukup untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi setiap pegawai.

BAB IV PENUTUP

Laporan kinerja Biro SDMOT Tahun 2023 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas rencana kinerja yang telah ditetapkan. Biro SDMOT senantiasa berupaya melakukan perbaikan secara berkesinambungan sebagai wujud komitmen untuk selalu meningkatkan akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Biro SDMOT Tahun 2023 menjabarkan capaian atas indikator kinerja pada 4 (empat) sasaran kegiatan. Pada prinsipnya keempat sasaran strategis tersebut dapat dicapai bahkan melebihi target.

Sasaran “*Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas*” memperoleh capaian sebesar 111,11% (Memuaskan), sasaran “*Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia*” sebesar 100,41% (Memuaskan), sasaran “*Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana*” sebesar 109,40% (Memuaskan), dan sasaran “*Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana yang Efektif*” sebesar 110,11% (Memuaskan).

Meskipun capaian yang diperoleh relatif sudah baik, upaya perbaikan dan peningkatan kinerja harus terus dilakukan. Memperhatikan hasil capaian kinerja dan dalam rangka meningkatkan kinerja Biro SDMOT Tahun 2024, saran dan upaya tindaklanjut yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Optimalisasi teknologi dalam penyelenggaraan layanan kepegawaian;
- b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet secara berkelanjutan;
- c) Penguatan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; dan
- d) Meningkatkan kualitas pengelolaan pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Jabatan Tinggi Madya kepada Tim Penilai Akhir.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumen Perjanjian Kinerja Biro SDMOT Tahun 2023


SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Henny Navilah, S.H., LL.M.
 Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
 Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023
 Pihak Pertama,
 Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
 Organisasi, dan Tata Laksana

 Henny Navilah, S.H., LL.M.

Pihak Kedua,
 Deputi Bidang Administrasi

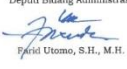
 Farid Utomo, S.H., M.H.


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	90 Persen
2	Meningkatnya kualitas layanan manajemen sumber daya manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	80 Persen
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	85 Persen
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	85 Persen
	Indeks Sistem Merit	300 (Sangat Baik)	
3	Meningkatnya efektivitas layanan manajemen organisasi dan tata laksana	Nilai Evaluasi Kelembagaan	80 Persen
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80 Persen
		Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu	80 Persen
4	Terwujudnya Pengelolaan Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana yang efektif	Persentase kepuasan terhadap layanan bantuan hukum	75 Persen
		Indeks Revisi Program dan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	C (9-12 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	90 Persen

Kegiatan **Anggaran**
 Penyusunan rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir
 1. Penyusunan Sidang Tim Penilai Akhir Rp288.137.000,-

2. Pelaksanaan Sidang Tim Penilai Akhir	Rp1.359.864.000,-
3. Penyusunan Rancangan Keputusan Presiden	Rp169.000.000,-
4. Persetujuan Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Negara	Rp34.200.000,-
Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	
1. Gaji dan Tunjangan	Rp196.753.839.000,-
2. Rekrutmen dan pengangkatan pegawai	Rp512.350.000,-
3. Pembinaan kepegawaian	Rp706.958.000,-
4. Promosi, mutasi dan rotasi, serta kenaikan pangkat Pegawai	Rp1.218.736.000,-
5. Pengembangan kepegawaian	Rp5.490.403.000,-
6. Pemberhentian pegawai	Rp14.084.000,-
7. Pembentukan Peraturan Internal	Rp356.728.000,-
8. Perjanjian Kerjasama/MoU	Rp13.500.000,-
9. Pengelolaan kelembagaan	Rp195.973.000,-
10. Evaluasi ketatalaksanaan SOP, Standar Pelayanan dan proses bisnis	Rp117.844.000,-
11. Pelaksanaan bantuan hukum	Rp19.700.000,-
Total Anggaran	Rp207.251.316.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023
 Pihak Kedua,
 Deputi Bidang Administrasi

 Farid Utomo, S.H., M.H.

Pihak Pertama,
 Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
 Organisasi, dan Tata Laksana

 Henny Navilah, S.H., LL.M.

Lampiran 2: Matriks Capaian Kinerja Biro SDMOT Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu Awal	Pagu Revisi	Penyerapan
1	Terwujudnya Rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang diselesaikan secara tepat waktu	90%	100%	111,11%	Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp.1.851.201.000	Rp.1.638.784.000	97,62%

2	Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	Persentase kepuasan layanan kepegawaian	80%	82,14%	102,67%	Dukungan Manajemen	Rp.204.696.370.000	Rp.277.706.823.000	99,19%
		Persentase kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai	85%	80,21%	94,36%				
		Persentase kepuasan layanan pembinaan pegawai	85%	80,74%	94,98%				
		Indeks Sistem Merit	300	329	109,66%				
3	Meningkatnya Efektivitas Layanan Manajemen Organisasi dan Tata Laksana	Nilai Evaluasi Kelembagaan	80%	72,92%	91,15%	Dukungan Manajemen	Rp.703.745.000	Rp.213.931.000	66,25%
		Persentase penilaian atas efektivitas manajemen tata laksana	80%	80,41%	100,51%				
		Persentase produk hukum yang diselesaikan secara tepat waktu	80%	80,34%	100,42%				
		Persentase kepuasan terhadap bantuan layanan hukum	75%	79,70%	106,26%				

Lampiran 3: Matriks Penyerapan Anggaran Biro SDMOT Tahun 2023

Rincian anggaran yang dipergunakan untuk setiap Komponen RAB:

Kode	Kegiatan/Komponen	Pagu Anggaran Revisi	Realisasi Anggaran	Persentase Penyerapan
5010	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	227.920.754.000	196.278.533.825	99,10%
EBA.957	Layanan Hukum	10.200.000	10.200.000	81,76%
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	203.709.000	202.809.896	99,56%
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	22.000	0	0%
EBA.994	Layanan Perkantoran	222.410.676.000	220.389.383.050	99,09%
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	5.296.147.000	5.259.095.764	99,30%
4984.AAE.001	Rancangan Keputusan Presiden terkait Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil siding TPA	1.638.784.000	1.599.748.015	97,62%
TOTAL		229.559.538.000	227.461.236.725	98,36%

Lampiran 4 : Penyelesaian Keputusan Sekretaris Kabinet

NO.	Perihal	Nomor	Tanggal Penetapan
1	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan pada Sekretariat Kabinet	5 Tahun 2023	10 Januari 2023
2	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Asisten dan Pembantu Asisten Utusan Khusus Presiden	6 Tahun 2023	18 Januari 2023
3	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	7 Tahun 2023	19 Januari 2023
4	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Kabinet	8 Tahun 2023	27 Januari 2023
5	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	9 Tahun 2023	27 Januari 2023
6	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	14 Tahun 2023	9 Februari 2023
7	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Sekretariat Kabinet	16 Tahun 2023	15 Februari 2023
8	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Asisten Dan Pembantu Asisten Utusan Khusus Presiden	17 Tahun 2023	15 Februari 2023
9	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penerjemah Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	18 Tahun 2023	17 Februari 2023
10	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	19 Tahun 2023	27 Februari 2023

NO.	Perihal	Nomor	Tanggal Penetapan
11	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Asisten Dan Pembantu Asisten Sekretaris Pribadi Presiden Serta Pemberhentian Pembantu Asisten Sekretaris Pribadi Presiden	24 Tahun 2023	5 April 2023
12	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	25 Tahun 2023	5 April 2023
13	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Asisten Dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden Serta Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	26 Tahun 2023	11 April 2023
14	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	27 Tahun 2023	11 April 2023
15	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	28 Tahun 2023	13 April 2023
16	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	29 Tahun 2023	13 April 2023
17	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	31 Tahun 2023	26 April 2023
18	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Badan Siber Dan Sandi Negara Pada Sekretariat Kabinet	32 Tahun 2023	26 April 2023
19	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	38 Tahun 2023	30 Mei 2023
20	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	39 Tahun 2023	31 Mei 2023

NO.	Perihal	Nomor	Tanggal Penetapan
21	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Keuangan Pada Sekretariat Kabinet	41 Tahun 2023	16 Juni 2023
22	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	42 Tahun 2023	16 Juni 2023
23	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	43 Tahun 2023	16 Juni 2023
24	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	44 Tahun 2023	16 Juni 2023
25	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Staf Khusus Sekretaris Kabinet	45 Tahun 2023	3 Juli 2023
26	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penerjemah Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	48 Tahun 2023	17 Juli 2023
27	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	49 Tahun 2023	24 Juli 2023
28	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	51 Tahun 2023	26 Juli 2023
29	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pengawas Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana	53 Tahun 2023	26 Juli 2023
30	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pelaksana	54 Tahun 2023	8 Agustus 2023

NO.	Perihal	Nomor	Tanggal Penetapan
31	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana	55 Tahun 2023	9 Agustus 2023
32	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	56 Tahun 2023	11 Agustus 2023
33	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	58 Tahun 2023	5 September 2023
34	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pembantu Asisten Utusan Khusus Presiden	60 Tahun 2023	5 September 2023
35	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana	61 Tahun 2023	7 September 2023
36	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Jabatan Administrator	62 Tahun 2023	7 September 2023
37	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrasi Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	64 Tahun 2023	15 September 2023
38	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	65 Tahun 2023	15 September 2023
39	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	66 Tahun 2023	15 September 2023
40	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pelaksana Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	67 Tahun 2023	15 September 2023

NO.	Perihal	Nomor	Tanggal Penetapan
41	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	68 Tahun 2023	15 September 2023
42	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Asisten Dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	70 Tahun 2023	15 September 2023
43	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	72 Tahun 2023	25 Oktober 2023
44	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Penerjemah Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	73 Tahun 2023	25 Oktober 2023
45	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Auditor Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	74 Tahun 2023	25 Oktober 2023
46	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden Serta Pengangkatan Asisten Dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	75 Tahun 2023	31 Oktober 2023
47	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Asisten Dan Staf Khusus Staf Khusus Presiden Aminuddin Ma'ruf	78 Tahun 2023	31 Oktober 2023
48	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Dan Pengangkatan Asisten Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi	81 Tahun 2023	16 November 2023
49	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	82 Tahun 2023	16 November 2023
50	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden Putri Indahsari Tanjung	83 Tahun 2023	27 November 2023

NO.	Perihal	Nomor	Tanggal Penetapan
51	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden Ayu Kartika Dewi	84 Tahun 2023	27 November 2023
52	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang pemberhentian dan pengangkatan Pembantu asisten utusan khusus presiden	85 Tahun 2023	29 November 2023
53	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Asisten Dan Pembantu Asisten Staf Khusus Presiden	89 Tahun 2023	8 Desember 2023
54	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pemberhentian Dari Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	91 Tahun 2023	29 Desember 2023
55	Keputusan Sekretaris Kabinet tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Sekretariat Kabinet	92 Tahun 2023	29 Desember 2023

Lampiran 5: Penyelenggaraan Program Pengembangan Kapasitas Pegawai

NO.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
1	Diskusi implementasi <i>coaching/mentoring</i> dan magang/praktik kerja	20	12 Januari 2023	Ruang Rapat Biro Renkeu Lt. 1
2	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda	1	13 Januari s.d. 16 Februari 2023	
3	<i>Legal Drafting</i>	6	24 s.d. 26 Januari 2023	Zoom
4	<i>Benchmark Learning Management System</i>	7	17 Januari 2023	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara
5	Soul of Speaking for STAR	4	21 s.d. 22 Januari 2023	Swiss-Belhotel Pomdok Indah
6	E-Learning Pengendalian Intern pada Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengantar PIPK	19	25 s.d. 31 Mei 2023	Online Kemenkeu Learning Center
7	Rapat Pembahasan Rencana Awal Renja Sekretariat Kabinet 2024	1	26 Januari 2023	JW Marriot Jakarta
8	Sosialisasi Peraturan/Ketentuan tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran TA 2023	6	30 Januari 2023	Le Meridien Jakarta
9	Soul of Speaking for STAR	4	4 s.d. 5 Februari 2023	Swiss-Belhotel Pomdok Indah
10	BESTIE Spin Off "Coaching Mentoring"	384	23 Februari 2023	Zoom
11	Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan X	1	7 Maret s.d. 16 Mei 19 Mei s.d. 14 Juli	Daring, Magang

NO.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
12	Singapore Cooperation Programme (SCP) Course On Law Of The Sea And Climate Change	1	6 s.d. 10 Maret 2023	Zoom
13	Soul of Speaking for Oscar	15	17 s.d. 21 Maret 2023	Griya Persada, Bandung
14	Women in Foreign Policy Fellowship	1	10 s.d. 11 Maret 2023	Jakarta
15	Human Resources (HR) Festival	4	26 s.d. 31 Maret 2023	Zurich, Swiss
16	E-Learning Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran	5	19 s.d. 27 Juni 2023 22 s.d. 30 Mei 2023 7 s.d. 11 Agustus 2023 23 s.d. 31 Oktober 2023	Daring
17	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II	6	24 Maret s.d. 3 Agustus 2023	Hybrid
18	Legislative Drafting Training Intermediate Level	25	11 s.d. 24 April 2023	Training Room JSLG, Gedung Sarinah
19	ICHRNT 2023 XVII International Conference on Human Resorce Management and Technology	4	11 s.d. 16 April 2023	Paris, Perancis
20	BESTIE Spin Off "Studi Komparasi: Kedudukan dan Pengelolaan Risalah Persidangan Kabinet di Berbagai Negara"	365	12 April 2023	Zoom
21	Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 2023	1	7 Mei s.d. 24 Juni 2023	Da Nang, Vietnam
22	Pelatihan Kompetensi Teknis Penyusutan Arsip Negara dan Dokumen Perusahaan pada Era SPBE	1	15 s.d. 18 Mei 2023	The Lux Hotel, Bandung

NO.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
23	<i>Soul of Speaking for Prime</i>	5	20 s.d. 21 Mei 2023	Swiss Belhotel, Pondok Indah
24	<i>Information Technology Auditor</i>	2	21 s.d. 27 Mei 2023	Hotel Onih, Bogor
25	<i>Certified Ethical Hacker (CEH)</i>	3	22 s.d. 26 Mei 2023	Treasury Tower, Jakarta
26	Bimbingan Teknis Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	4	23 s.d. 24 Mei 2023	Hotel Sunlake, Sunter Jakarta Utara
27	<i>Mobile Programming</i>	6	27 s.d. 31 Mei 2023	Amartahills Hotel & Resort Kota Batu, Malang
28	<i>Soul of Speaking for Prime II</i>	3	3 s.d. 4 Juni 2023	Swiss Belhotel, Pondok Indah
29	Pelatihan <i>Certified Risk Governance Professional</i>	1	5 s.d. 9 Juni 2023	Hotel Santika Botani Square, Bogor
30	Audit Infrastruktur dan Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (AIA SPBE)	20	6 s.d. 8 Juni 2023	PUSPITEK BRIN
31	Seminar on Risk Management of Government for Indonesia	3	6 s.d. 19 Juni 2023	Beijing, RRT
32	Keterampilan Menulis Efektif di Lingkungan Pemerintahan	30	11 s.d. 14 Juni 2023	Hotel Four Point, Bandung
33	E-Learning Pengendalian Intern pada Pelaporan Keuangan (PIPK)	3	12 Juni s.d. 15 Juli 2023	
34	BESTIE Spin-off: Sosialisasi Survei Penilaian Internal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	338	21 Juni 2023	Zoom
35	ISO 27001:2022 ISMS Foundation	10	3 s.d. 6 Juli 2023	Hotel Rinra, Makasar

NO.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
36	<i>Singapore Cooperation Programme 2023/2024 "Carbon Accounting"</i>	1	9 s.d. 15 Juli 2023	Singapura
37	<i>Smart Coaching and Mentoring Batch 1</i>	23	11 s.d. 12 Juli 2023	Hotel Aston, Sentul
38	Pelatihan Jarak Jauh Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Angkatan III	3	3 Juli s.d. 3 September 2023	Daring
39	Uji Kompetensi	44	3 s.d. 5 Juli 2023	PPKASN, Assessment Center BKN
40	<i>KOICA " Capacity Building on Legislative System Improvement in Indonesia"</i>	15	17 s.d. 21 Juli 2023	Korea Selatan
41	<i>English for Business</i>	20	24 s.d 28 Juli 2023	Hotel Swiss Bellin, Bogor
42	Rapat Kerja Pusat XXIV dan Seminar Ilmiah Nasional Ikatan Pustakawan Indonesia	4	26 s.d. 28 Juli 2023	Hotel Lombok Raya, Mataram, NTB
43	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV	3	13 Juli s.d. 23 November 2023	Hybrid
44	<i>Computer Hacking Forensic Investigator</i>	1	27 Agustus s.d. 7 September 2023	Bandung
45	Pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan II Tahun 2023	1	1 Agustus s.d. 6 Desember 2023	Hybrid
46	Sertifikasi SDM Kearsipan Angkatan IV dan V	2	20 s.d. 22 September 2023	ANRI, Jakarta
47	Pelatihan Penjenjangan Auditor Ahli Muda	1	9 s.d. 20 Oktober 2023	Daring
48	<i>Singapore Cooperation Programme 2023/2024 "Innovations in Governance"</i>	1	23 s.d. 27 Oktober 2023	Singapura
49	Bimbingan Teknis Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Humas	13	31 Oktober, 1 November 2023	Ruang Rapat Deputi Administrasi Lt. 1

NO.	Nama Kegiatan	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan
50	Singapore Cooperation Programme 2023/2024 "Urban Health Security"	1	20 s.d. 24 November 2023	Singapura
51	BESTIE Tahun 2023			
	Sisi Psikologi dalam Menghadapi Dinamika Perubahan Organisasi	364	13 November 2023	Zoom
	<i>Self-Awareness: Enhancing Your Positive Character</i>	365	15 November 2023	Zoom
	Kepemimpinan dalam Perspektif Pramono Anung: Pemimpin Ideal dalam Realita	493	22 November 2023	Zoom
	Sosialisasi Kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri	260	27 November 2023	Zoom
	Literasi dan Inklusi Keuangan	247	29 November 2023	Zoom
	Sosialisasi Skrining dan Deteksi Dini Kanker Payudara	199	5 Desember 2023	Zoom
	Merencanakan Kesejahteraan dan Kemerdekaan Finansial	230	6 Desember 2023	Zoom
	Menumbuhkan Kesadaran dan Peran Aktif ASN Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba	186	12 Desember 2023	Zoom
<i>Public Speaking</i>	525	14 Desember 2023	Zoom	
44	Singapore Cooperation Programme 2023/2024 "Strategic Leadership and Public Governance"	1	26 November s.d. 2 Desember 2023	Singapura
45	The 2023 APDP-GMPA Conference Essay Competition	1	14 s.d. 15 Desember 2023	Korea Selatan

Lampiran 6: Penanganan Kasus Disiplin dan Hukum Pegawai

No	Nama Kasus	Waktu Mulai Penanganan
1	Pembinaan Pegawai Tidak Tetap a.n. PWP	Januari 2023
2	Pembinaan Pegawai Tidak Tetap a.n. AKR	Maret 2023
3	Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik PNS a.n. DR	Maret 2023
4	Perceraian Pegawai a.n. RDW	April 2023
5	Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik PNS a.n. DW	Juni 2023
6	Tindak Lanjut Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik PNS a.n. GOZ	Oktober 2023
7	Laporan atas Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik PNS a.n. CP	Oktober 2023
8	Laporan atas Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik PNS a.n. BP	November 2023
9	Laporan atas Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik PNS a.n. AF	November 2023
10	Pembinaan Pegawai Tidak Tetap a.n. DM	Desember 2023

Lampiran 7: Penerbitan Peraturan Internal

NO.	JENIS PERATURAN	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
1	Peraturan Sekretaris Kabinet	Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 1 Tahun 2023	2 Januari 2023
2	Peraturan Sekretaris Kabinet	Quick Wins Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2023	Nomor 2 Tahun 2023	3 Maret 2023
3	Peraturan Sekretaris Kabinet	Pengembangan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 4 Tahun 2023	13 April 2023
4	Peraturan Sekretaris Kabinet	Grand Design Pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah Tahun 2023-2037	Nomor 5 Tahun 2023	5 Juni 2023
5	Peraturan Sekretaris Kabinet	Penajaman Road Map Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet 2020-2024	Nomor 7 Tahun 2023	26 September 2023
6	Peraturan Sekretaris Kabinet	Layanan Konseling Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 8 Tahun 2023	2 Oktober 2023
7	Peraturan Sekretaris Kabinet	Manajemen Talenta di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 9 Tahun 2023	7 November 2023
8	Peraturan Sekretaris Kabinet	Sekretariat Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya	Nomor 10 Tahun 2023	1 Desember 2023
9	Peraturan Sekretaris Kabinet	Tata Cara Pemberian Tunjangan Khusus Dukungan Tugas Kepresidenan Bagi Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, Staf	Nomor 11 Tahun 2023	29 Desember 2023

		Khusus Wakil Presiden, Wakil Sekretaris Pribadi Presiden, Asisten, dan Pembantu Asisten		
10	Keputusan Sekretaris Kabinet	Pengelola Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2023	Nomor 1 Tahun 2023	2 Januari 2023
11	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penunjukan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 2 Tahun 2023	2 Januari 2022
12	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan di Lingkungan Sekretariat Kabinet Dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet	Nomor 3 Tahun 2023	2 Januari 2023
13	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat Dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet	Nomor 4 Tahun 2023	2 Januari 2023
14	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Peralatan dan Mesin dan Barang Persediaan Dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet	Nomor 15 Tahun 2023	14 Februari 2023
15	Keputusan Sekretaris Kabinet	Tim Penyusun Grand Design Sertifikasi Kepakaran Jabatan Fungsional Penerjemah	Nomor 20 Tahun 2023	3 Maret 2023
16	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penetapan Status Barang Milik Negara Pada Sekretariat Kabinet	Nomor 22 Tahun 2023	28 Maret 2023
17	Keputusan Sekretaris Kabinet	Lokus Evaluasi Pelayanan Publik dan Tim Evaluator Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2023	Nomor 30 Tahun 2023	13 April 2023

18	Keputusan Sekretaris Kabinet	Perubahan atas Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Barang Persediaan di Lingkungan Sekretariat Kabinet Dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet	Nomor 35 Tahun 2023	23 Mei 2023
19	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat Dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet	Nomor 40 Tahun 2023	5 Juni 2023
20	Keputusan Sekretaris Kabinet	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 6 Tahun 2023	3 Juli 2023
21	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Kabinet	Nomor 46 Tahun 2023	13 Juli 2023
22	Keputusan Sekretaris Kabinet	Tim Tanggap Insiden Siber Sekretariat Kabinet	Nomor 47 Tahun 2023	18 Juli 2023
23	Keputusan Sekretaris Kabinet	Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2023-2024	Nomor 50 Tahun 2022	26 Juli 2023
24	Keputusan Sekretaris Kabinet	Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 59 Tahun 2023	1 September 2023
25	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Dinas Bermotor Roda	Nomor 63 Tahun 2023	14 September 2023

		Empat Dari Daftar Barang Sekretariat Kabinet		
26	Keputusan Sekretaris Kabinet	Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi pada Satuan Kerja dan Unit Eselon I Sekretariat Kabinet	Nomor 69 Tahun 2023	4 Oktober 2023
27	Keputusan Sekretaris Kabinet	Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2023	Nomor 71 Tahun 2023	25 Oktober 2023
28	Keputusan Sekretaris Kabinet	Perubahan atas Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pengurus dan Penyimpan Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 76 Tahun 2023	31 Oktober 2023
29	Keputusan Sekretaris Kabinet	Tim Percepatan Pembentukan Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 77 Tahun 2023	7 November 2023
30	Keputusan Sekretaris Kabinet	Kamus Kompetensi Teknis di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 80 Tahun 2023	14 November 2023
31	Keputusan Sekretaris Kabinet	Susunan Keanggotaan Sekretariat Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya	Nomor 86 Tahun 2023	1 Desember 2023
32	Keputusan Sekretaris Kabinet	Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Kabinet	Nomor 88 Tahun 2023	1 Desember 2023
33	Keputusan Sekretaris Kabinet	Pemusnahan Arsip Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2001-2010 dan Arsip Biro Sumber Daya Manusia,	Nomor 90 Tahun 2023	18 Desember 2023

		Organisasi, dan Tata Laksana Tahun 2009-2015		
34	Peraturan Deputi Bidang Administrasi	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 1 Tahun 2023	3 Juli 2023
35	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Penunjukan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet	Nomor 1 Tahun 2023	2 Januari 2023
36	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 114 Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2023	Nomor 2 Tahun 2023	2 Januari 2023
37	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Penetapan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2023	KEP.4/ADM/II/2023	1 Februari 2023
38	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Penggunaan Sistem SAKTI di Lingkungan Sekretariat Kabinet	KEP.5/ADM/II/2023	14 Februari 2023
39	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Pelaksana Evaluasi Capaian Kerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019-2022	KEP.6/ADM/II/2023	22 Februari 2023
40	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Penyusun Buku Pencapaian Kerja Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Periode Kepemimpinan Presiden Joko Widodo	KEP.7/ADM/II/2023	22 Februari 2023
41	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Sekretariat Kabinet	KEP.8/ADM/II/2023	28 Februari 2023

42	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Pengawas Kearsipan di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2023	KEP.11/ADM/V/2023	2 Mei 2023
43	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Panitia Rapat Kerja Sekretariat Kabinet Tahun 2023	KEP.12/ADM/V/2023	26 Mei 2023
44	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Komunitas Digital Sekretariat Kabinet Tahun 2023	KEP.13/ADM/VI/2023	5 Juni 2023
45	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KEP.25/ADM/X/2022 tentang Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2023	KEP.14/ADM/VI/2023	22 Juni 2023
46	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Pengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Sekretariat Kabinet	KEP.15/ADM/07/2023	3 Juli 2023
47	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Lingkungan Sekretariat Kabinet	KEP.16/ADM/07/2023	5 Juli 2023
48	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Penerjemah Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Tanggal 16 Agustus 2023	KEP.18/ADM/VIII/2023	7 Agustus 2023
49	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem	KEP.19/ADM/08/2023	21 Agustus 2023

		Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet		
50	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Tim Penerap dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Kabinet	KEP.20/ADM/IX/2023	27 September 2023
51	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Panitia Penilai dan Pemusnahan Arsip Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2001-2010 dan Arsip Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana Tahun 2009-2015	KEP.21/ADM/IX/2023	29 September 2023
52	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penonaktifan dan Penunjukan Pengguna Sistem SAKTI Sekretariat Kabinet	KEP.22/ADM/X/023	2 Oktober 2023
53	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pengguna Sistem SAKTI Sekretariat Kabinet	KEP.23/ADM/X/023	23 Oktober 2023
54	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Selaku Kuasa Pengguna Barang tentang Satuan Biaya Pelayanan/Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2024	KEP.24/ADM/X/2023	25 Oktober 2023
55	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Perubahan Atas Keputusan Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor:	KEP.25/ADM/X/2023	2 November 2023

		KEP.8/ADM/II/2023 tentang Panitia Penghapusan Barang Milik Negara Sekretariat Kabinet		
56	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Panitia Penilai Arsip Usul Serah Tahun 2023	KEP.28/ADM/XI/2023	12 Desember 2023
57	Keputusan Deputi Bidang Administrasi	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Satuan Kerja Bagian Anggaran 114 Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2024	KEP.29/ADM/XI/2023	29 Desember 2023
58	Instruksi Sekretaris Kabinet	Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan	1 TAHUN 2023	17 Juli 2023
59	Perjanjian Kerja Sama	Jasa Penyimpanan Arsip Sekretariat Kabinet Antara Sekretariat Kabinet dengan Arsip Nasional Indonesia (ANRI)	1/SETKAB/PKS/I/2023	2 Januari 2023
60	Perjanjian Kerja Sama	Pemanfaatan Layanan Virtual Private Server	2/SETKAB/PKS/I/2023	2 Januari 2023
61	Nota Kesepahaman	Nota Kesepahaman antara Sekretariat Kabinet dan Universitas Gadjah Mada tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	3/SETKAB/MoU/II/2023	13 Februari 2023
62	Nota Kesepahaman	Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman antara Universitas Udayana dan Sekretariat Kabinet tentang Penyelenggaraan	4/SETKAB/MoU/II/2023	7 Juni 2023

		Tri Dharma Perguruan Tinggi		
63	Perjanjian Kerahasiaan	Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sekretariat Kabinet 2024-2028	6.1/SETKAB/PK/X/2023	12 Oktober 2023
64	Perjanjian Kerahasiaan	Kerahasiaan Data dan/atau Informasi Hak Akses, Data, dan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Manajemen Kabinet	6.2/SETKAB/PK/X/2023	12 Oktober 2023
65	Perjanjian Kerja Sama	Layanan Mandiri Payroll	7/SETKAB/PKS/X/2023	24 Oktober 2023
66	Perjanjian Kerahasiaan	Kerahasiaan Data dan/atau Informasi dalam Digitisasi Arsip Sekretariat Kabinet	8/SETKAB/PKS/XI/2023	28 November 2023
67	Perjanjian Kerja Sama	Praktisi Mengajar, Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Serta Penelitian dan Publikasi	9/SETKAB/PKS/XII/2023	21 November 2023
68	Perjanjian Kerja Sama	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dan Praktisi Mengajar	10/SETKAB/PKS/XII/2023	21 Desember 2023
69	Surat Kuasa	Penandatanganan Layanan Mandiri Payroll	1/ADM/SK/XI/2023	23 Oktober 2023
70	Surat Kuasa	Penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dengan PT Smartpro Solusi Mitra	2/ADM/SK/XI/2023	17 November 2023

71	Surat Kuasa	Penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dengan PT Paradigma Matra Indonesia	3/ADM/SK/XI/2023	17 November 2023
72	Surat Kuasa	Penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan Data dan/atau Informasi dalam Digitisasi Arsip Sekretariat Kabinet	4/ADM/SK/XI/2023	27 November 2023

Lampiran 8: Penerbitan Keputusan Presiden (TPA)

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
1.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	1/TPA	16 Januari 2023
2.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2/TPA	17 Januari 2023
3.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3/TPA	17 Januari 2023
4.	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Narkotika Nasional	4/TPA	17 Januari 2023
5.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara	5/TPA	17 Januari 2023
6.	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Keamanan Laut	6/TPA	26 Januari 2023
7.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional	7/TPA	26 Januari 2023
8.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial	8/TPA	26 Januari 2023
9.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	9/TPA	26 Januari 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
	Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan		
10.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	10/TPA	26 Januari 2023
11.	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	11/TPA	30 Januari 2023
12.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	12/TPA	30 Januari 2023
13.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	13/TPA	13 Februari 2023
14.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum	14/TPA	13 Februari 2023
15.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	15/TPA	13 Februari 2023
16.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	16/TPA	13 Februari 2023
17.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	17/TPA	13 Februari 2023
18.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	18/TPA	13 Februari 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
	Madya di Lingkungan Badan Pusat Statistik		
19.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	19/TPA	13 Februari 2023
20.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	20/TPA	13 Februari 2023
21.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial	21/TPA	13 Februari 2023
22.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Keamanan Laut	22/TPA	13 Februari 2023
23.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	23/TPA	13 Februari 2023
24.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	24/TPA	13 Februari 2023
25.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	25/TPA	13 Februari 2023
26.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	26/TPA	13 Februari 2023
27.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	27/TPA	13 Februari 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
28.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	28/TPA	13 Februari 2023
29.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan	29/TPA	13 Februari 2023
30.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	30/TPA	13 Februari 2023
31.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara	31/TPA	13 Februari 2023
32.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara	32/TPA	13 Februari 2023
33.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	33/TPA	Kamis, 02 Maret 2023
34.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan	34/TPA	Kamis, 02 Maret 2023
35.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana	35/TPA	Kamis, 02 Maret 2023
36.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	36/TPA	Rabu, 08 Maret 2023
37.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	37/TPA	Rabu, 08 Maret 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
	Madya di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan		
38.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perindustrian	38/TPA	Selasa, 28 Maret 2023
39.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	39/TPA	Selasa, 28 Maret 2023
40.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional	40/TPA	Selasa, 28 Maret 2023
41.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	41/TPA	Selasa, 28 Maret 2023
42.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	42/TPA	Selasa, 28 Maret 2023
43.	Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	43/TPA	Selasa, 28 Maret 2023
44.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional	44/TPA	Selasa, 28 Maret 2023
45.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara	45/TPA	Selasa, 28 Maret 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
46.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	46/TPA	Selasa, 28 Maret 2023
47.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	47/TPA	Selasa, 28 Maret 2023
48.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan	48/TPA	Selasa, 28 Maret 2023
49.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	49/TPA	Selasa, 28 Maret 2023
50.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	50/TPA	Selasa, 28 Maret 2023
51.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	51/TPA	Senin, 03 April 2023
52.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	52/TPA	Kamis, 13 April 2023
53.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara	53/TPA	Kamis, 13 April 2023
54.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	54/TPA	Kamis, 13 April 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
55.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Mahkamah Konstitusi	55/TPA	Senin, 15 Mei 2023
56.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	56/TPA	Senin, 15 Mei 2023
57.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	57/TPA	Senin, 15 Mei 2023
58.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	58/TPA	Senin, 15 Mei 2023
59.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	59/TPA	Senin, 15 Mei 2023
60.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	60/TPA	Senin, 15 Mei 2023
61.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	61/TPA	Senin, 15 Mei 2023
62.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara	62/TPA	Senin, 15 Mei 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
63.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	63/TPA	Senin, 15 Mei 2023
64.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara	64/TPA	Senin, 15 Mei 2023
65.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional	65/TPA	Senin, 15 Mei 2023
66.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	66/TPA	Senin, 15 Mei 2023
67.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	67/TPA	Senin, 15 Mei 2023
68.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	68/TPA	Senin, 15 Mei 2023
69.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Kabinet	69/TPA	Senin, 15 Mei 2023
70.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi	70/TPA	Senin, 15 Mei 2023
71.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	71/TPA	Senin, 15 Mei 2023
72.	Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	72/TPA	Senin, 15 Mei 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
73.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	73/TPA	Senin, 15 Mei 2023
74.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	74/TPA	Senin, 15 Mei 2023
75.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan	75/TPA	Senin, 15 Mei 2023
76.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	76/TPA	Selasa, 13 Juni 2023
77.	Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	77/TPA	Selasa, 13 Juni 2023
78.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi	78/TPA	Selasa, 13 Juni 2023
79.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan	79/TPA	Selasa, 13 Juni 2023
80.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	80/TPA	Selasa, 13 Juni 2023
81.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia	81/TPA	Selasa, 13 Juni 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
82.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	82/TPA	Selasa, 13 Juni 2023
83.	Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pusat Statistik	83/TPA	Senin, 17 Juli 2023
84.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	84/TPA	Senin, 17 Juli 2023
85.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	85/TPA	Senin, 17 Juli 2023
86.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika	86/TPA	Senin, 17 Juli 2023
87.	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Kepala Badan Pusat Statistik	87/TPA	Senin, 17 Juli 2023
88.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	88/TPA	Senin, 17 Juli 2023
89.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan	89/TPA	Senin, 17 Juli 2023
90.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	90/TPA	Jumat, 21 Juli 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
91.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	91/TPA	Senin, 24 Juli 2023
92.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	92/TPA	Senin, 24 Juli 2023
93.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional	93/TPA	Rabu, 26 Juli 2023
94.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	94/TPA	Rabu, 26 Juli 2023
95.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	95/TPA	Rabu, 26 Juli 2023
96.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara	96/TPA	Rabu, 26 Juli 2023
97.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	97/TPA	Rabu, 26 Juli 2023
98.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	98/TPA	Rabu, 26 Juli 2023
99.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana	99/TPA	Rabu, 26 Juli 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
100.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	100/TPA	Rabu, 26 Juli 2023
101.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	101/TPA	Rabu, 26 Juli 2023
102.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan	102/TPA	Rabu, 26 Juli 2023
103.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	103/TPA	Kamis, 03 Agustus 2023
104.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia	104/TPA	Kamis, 03 Agustus 2023
105.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan	105/TPA	Kamis, 03 Agustus 2023
106.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	106/TPA	Kamis, 03 Agustus 2023
107.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan	107/TPA	Kamis, 10 Agustus 2023
108.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian	108/TPA	Kamis, 10 Agustus 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
	Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan		
109.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung	109/TPA	Jumat, 18 Agustus 2023
110.	Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung	110/TPA	Jumat, 18 Agustus 2023
111.	Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	111/TPA	Jumat, 18 Agustus 2023
112.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	112/TPA	Jumat, 01 September 2023
113.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	113/TPA	Jumat, 01 September 2023
114.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	114/TPA	Jumat, 01 September 2023
115.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga	115/TPA	Jumat, 01 September 2023
116.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	116/TPA	Senin, 04 September 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
117.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Karantina Indonesia	117/TPA	Senin, 04 September 2023
118.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Keamanan Laut	118/TPA	Senin, 04 September 2023
119.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan	119/TPA	Senin, 04 September 2023
120.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	120/TPA	Senin, 04 September 2023
121.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional	121/TPA	Senin, 04 September 2023
122.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara	122/TPA	Senin, 04 September 2023
123.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	123/TPA	Senin, 04 September 2023
124.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	124/TPA	Senin, 04 September 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
125.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	125/TPA	Senin, 04 September 2023
126.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan	126/TPA	Senin, 04 September 2023
127.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan	127/TPA	Senin, 04 September 2023
128.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat	128/TPA	Senin, 04 September 2023
129.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	129/TPA	Senin, 04 September 2023
130.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia	130/TPA	Senin, 04 September 2023
131.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan	131/TPA	Senin, 04 September 2023
132.	Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia	132/TPA	Senin, 04 September 2023
133.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi	133/TPA	Selasa, 26 September 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
	Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara		
134.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	134/TPA	Selasa, 26 September 2023
135.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	135/TPA	Selasa, 26 September 2023
136.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perindustrian	136/TPA	Selasa, 26 September 2023
137.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian	137/TPA	Selasa, 26 September 2023
138.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu	138/TPA	Selasa, 26 September 2023
139.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	139/TPA	Selasa, 26 September 2023
140.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Keamanan Laut	140/TPA	Selasa, 26 September 2023
141.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri	141/TPA	Selasa, 26 September 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
142.	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	142/TPA	Selasa, 03 Oktober 2023
143.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	143/TPA	Selasa, 03 Oktober 2023
144.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	144/TPA	Kamis, 05 Oktober 2023
145.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan	145/TPA	Selasa, 10 Oktober 2023
146.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	146/TPA	Selasa, 10 Oktober 2023
147.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia	147/TPA	Rabu, 11 Oktober 2023
148.	Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	148/TPA	Senin, 23 Oktober 2023
149.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian	149/TPA	Selasa, 24 Oktober 2023
150.	Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian	150/TPA	Selasa, 24 Oktober 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
151.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat	151/TPA	Senin, 30 Oktober 2023
152.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	152/TPA	Selasa, 31 Oktober 2023
153.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pandayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	153/TPA	Selasa, 31 Oktober 2023
154.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan	154/TPA	Selasa, 31 Oktober 2023
155.	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri	155/TPA	Selasa, 31 Oktober 2023
156.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah	156/TPA	Selasa, 31 Oktober 2023
157.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan	157/TPA	Selasa, 31 Oktober 2023
158.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan	158/TPA	Selasa, 31 Oktober 2023
159.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi	159/TPA	Selasa, 31 Oktober 2023
160.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	160/TPA	Selasa, 31 Oktober 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
161.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Informasi Geospasial	161/TPA	Selasa, 31 Oktober 2023
162.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalma Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	162/TPA	Selasa, 31 Oktober 2023
163.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	163/TPA	Selasa, 31 Oktober 2023
164.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	164/TPA	Jumat, 24 November 2023
165.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agama	165/TPA	Jumat, 24 November 2023
166.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo	166/TPA	Jumat, 24 November 2023
167.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalma Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan	167/TPA	Jumat, 24 November 2023
168.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	168/TPA	Jumat, 24 November 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
169.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	169/TPA	Jumat, 24 November 2023
170.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	170/TPA	Jumat, 24 November 2023
171.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	171/TPA	Jumat, 24 November 2023
172.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara	172/TPA	Jumat, 24 November 2023
173.	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan	173/TPA	Jumat, 24 November 2023
174.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir	174/TPA	Jumat, 24 November 2023
175.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	175/TPA	Jumat, 24 November 2023
176.	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional	176/TPA	Jumat, 24 November 2023
177.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	177/TPA	Jumat, 24 November 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
178.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	178/TPA	Jumat, 24 November 2023
179.	Pemberhentian dan Pengangkatan Deputy di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	179/TPA	Jumat, 24 November 2023
180.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan	180/TPA	Jumat, 24 November 2023
181.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	181/TPA	Jumat, 24 November 2023
182.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Narkotika Nasional	182/TPA	Rabu, 29 November 2023
183.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara	183/TPA	Rabu, 29 November 2023
184.	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	184/TPA	Rabu, 13 Desember 2023
185.	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	185/TPA	Jumat, 22 Desember 2023
186.	Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal	186/TPA	Kamis, 28 Desember 2023

NO.	PERIHAL	NOMOR KEPUTUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN
	Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia		
187.	Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	187/TPA	Kamis, 28 Desember 2023

Lampiran 9:

Formulir *Checklist* Muatan Substansi LKj Biro SDM OT Tahun 2023

No	Jenis	Pernyataan	Checklist
1	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	√
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	√
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	√
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√
2	Mekanisme Penyusunan	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada Satuan Organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	√
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√
		3 Penyusunan LKj Satuan Organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	√
		4 Data informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√
3	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	√
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	√
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	√
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	√

		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	√